

**KOALISI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN-
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA-PARTAI AMANAT NASIONAL DAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2010**

Oleh : Khanif Idris - 14010110120042

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip@ac.id

ABSTRAK

Some researches about coalition had done by scholars show us the unstructured pattern of party coalition among one area to others. One of them is the research by Riri Romly which said that coalition among parties in a direct local election is pragmatic coalition. It is a kind of coalition which neglects the similarity of ideology, vision and mission, platform, and also working programs. Unfortunately it also happened in the coalition which is support the winner of Regent Election in Purbalingga, Central Java where PDI Perjuangan as the winner of legislative election there, develops coalition with PKB, PKS, and PAN which is near with Moslem society.

In this research, the author wants to know what the reasons of that coalition are. Besides, it also can be additional reference for coalition among political parties. In other hand, to do this research, the author use qualitative method and the data collection methods are interview and documentary study. Those data which I got, then, ascertained its validity by triangulation method, especially Method Triangulation.

From those background and research method, the result of this research is the author got the fact which shows us that the coalition among them only based on the aim to be winner by embrace every element in the society, the nationalist and the religious (Moslem). All in all, this result is in line with Heywood though which said that one of the motifs of coalition among parties is to win the game or called as Electoral Coalition.

Keywords : Coalition, Political Party, Ideology, Power, Purbalingga Regency

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 peserta pilkada adalah calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini dibentuk sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sejumlah pasal pada UU Nomor 32 Tahun 2004, khusus di Aceh peserta pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

Partai politik atau gabungan partai politik yang juga sering disebut dengan koalisi partai politik, hanya dapat mengusung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah jika memiliki jumlah perolehan kursi DPRD daerah bersangkutan sebesar 15% atau perolehan suara sah sebesar 15% pada pemilu anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak semua partai politik dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah sehingga harus berkoalisi dengan partai lain sehingga memenuhi syarat 15 % perolehan kursi di DPRD setempat atau suara sah sebesar 15% dari pemilu anggota DPRD setempat.

Sayangnya, banyak koalisi yang terbangun antar partai yang berbeda ideologi, seperti partai yang berideologi nasionalis berkoalisi dengan partai yang berbasis agama. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Riri Romli bahwa partai-partai politik dalam pilkada langsung tersebut cenderung pragmatis. Koalisi yang mereka bangun cenderung bukan berlandaskan kesamaan visi-misi, *platform*, dan

program-program partai, namun berdasarkan kepentingan jangka pendek yakni merebut kekuasaan.¹

Koalisi yang tidak berpola tersebut, akan membingungkan publik sebagai pemilih, seperti yang dikatakan Firmanzah Ph.D bahwa seringkali disuatu daerah X partai politik berkoalisi dengan partai politik B, dan melawan koalisi partai politik C dan D. Namun di daerah Y partai politik A berkoalisi dengan partai politik C melawan koalisi partai politik B dan D. Liarnya koalisi antar partai politik di pelbagai daerah akan membingungkan publik atas *positioning* yang dilakukan masing – masing partai. Ketika koalisi terbangun bukan atas dasar kesamaan ideologi, yang terjadi adalah kebingungan masyarakat atas partai politik yang menjalin koalisi, selain itu, hal tersebut juga memperkuat anggapan masyarakat bahwa koalisi partai politik dibangun atas dasar ingin mencapai kekuasaan semata.²

Salah satunya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga adalah bagian dari wilayah Ekskaresidenan Banyumas. Secara geopolitik, Eks – Karesidenan Banyumas adalah basis PDI Perjuangan. Di Purbalingga sendiri, PDI Perjuangan mendapatkan 13 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 atau 28,9% kursi DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pada pilkada Purbalingga tahun 2010, PDI Perjuangan mengusung calon Bupati dan calon wakil bupati. Namun, dalam pencalonannya PDI Perjuangan bekoalisi dengan tiga partai, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan

¹ Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 356

² Firmanzah, Ph.D. 2011. *Mengelola Partai politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 376

Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini menarik karena posisi PDI Perjuangan dalam hal ini dapat mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Purbalingga, apalagi calon yang diusung oleh PDI Perjuangan adalah petahana Wakil Bupati Purbalingga periode sebelumnya. Melihat latar belakang tersebut, dalam tulisan ini penulis akan membahas alasan yang melarbelakangi PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan PKS berkoalisi untuk memenangkan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada Kabupaten Purbalingga Tahun 2010.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yaitu, yang pertama, teori kekuasaan Max Weber, Laswell, serta Abraham Kaplan yang kemudian disimpulkan bahwa kekuasaan adalah sebuah hasil yang diperoleh dari sebuah proses politik, yang kemudian menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk memaksakan pengaruh atau keinginannya pada orang lain. Kedua, teori Demokrasi. Penulis menggunakan teori Demokrasi dari Huntington yang dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan struktur politik yang dikehendaki masyarakat dengan cara yang beradab, salah satunya dengan pemilihan secara langsung. Melalui pemilihan umum secara langsung, masyarakat dapat menentukan siapa tokoh yang dikehendai untuk menjadi pemimpin.

Ketiga adalah teori partai politik. Penulis mengambil teori dari Carl J. Friedrich dimana ia mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini,

memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.³ Terakhir, penulis menggunakan teori koalisi partai politik yang disampaikan oleh Heywood yang mengartikan koalisi sebagai sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah.⁴ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menghimpun data menggunakan metode wawancara yang kemudian dipastikan keabsahan data yang diperoleh dengan metode triangulasi metode.

PEMBAHASAN

Salah satu tujuan partai politik adalah menempatkan kadernya sebagai pejabat publik. Sebelum partai politik mencalonkan kadernya sebagai calon pejabat publik, mereka melakukan seleksi dengan mekanisme internal masing-masing, seperti yang terjadi di Kabupaten Purbalingga pada saat pemilu pada Kabupaten Purbalingga tahun 2010. Beberapa partai yang melakukan koalisi untuk mengusung pasangan Heru-Kento juga melakukan seleksi internal untuk mendapatkan kader terbaik. Dari keempat partai koalisi, sebelum melakukan koalisi mereka sudah mempertimbangkan apakah terdapat kader dalam partainya yang layak diajukan sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati Kabupaten Purbalingga. Tetapi, partai juga tidak dapat memaksakan diri untuk memajukan kadernya sendiri karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan partai, misalnya syarat perolehan kursi di DPRD setempat.

³ Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.. 404

⁴ Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hlm. 77

Dalam pemilu legislatif Kabupaten Purbalingga tahun 2009, PDI Perjuangan muncul sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 23,99%. Namun, angka ini tidak digunakan oleh PDI Perjuangan sebagai alat untuk mengusung kadernya sendiri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2010, PDI Perjuangan justru memilih untuk berkoalisi dengan PKB, PAN, dan PKS. Hasil pemilu legislatif Kabupaten Purbalingga 2009, PKB sendiri memperoleh suara sebesar 7,05%, PAN mendapatkan suara 7,27%, dan PKS 6,97%. Sehingga apabila diakumulasikan perolehan empat partai ini menjadi 45,28%. Dengan demikian, di atas kertas, koalisi ini bisa dipastikan memenangkan pilkada kabupaten Purbalingga yang pada saat itu diikuti oleh tiga pasangan calon.

PDI Perjuangan selaku motor penggerak koalisi menyatakan bahwa keinginan berkoalisi dimaksudkan semata-mata untuk memenangkan pasangan Heru-Kento secara mutlak dengan cara merangkul seluruh komponen masyarakat yang terwakilkan di partai berbasis nasionalis maupun yang dekat dengan basis masa Islam. Sedangkan tiga partai yang lain, yaitu PKB, PAN dan PKS, menyatakan bahwa koalisi terjalin dengan PDI Perjuangan semata-mata untuk tujuan kemenangan, karena melihat perolehan suara legislative PDI Perjuangan di Purbalingga sangat signifikan.

Dalam menentukan kebijakan untuk berkoalisi, partai-partai politik pengusung Heru-Kento ini memiliki mekanisme dan dinamika yang berbeda masing-masing partainya. Di dalam PDI Perjuangan, mekanisme itu berawal dari DPC yang memberikan rekomendasi kepada DPP partainya. Sedangkan PAN, koalisi diputuskan

di tingkat DPC. Sementara itu, PKB memutuskan koalisi setelah mengadakan rapat antara pengurus PAC, pengurus DPC, serta melibatkan tokoh NU di Kabupaten Purbalingga. Serupa dengan PKB, PKS juga melakukan hal yang sama, ketika akan melakukan koalisi, PKS melibatkan pengurus PAC dan DPC disertai orang yang berpengaruh di PKS yang sering disebut ustadz.

Walaupun telah memiliki mekanisme di dalam partai masing-masing, tetap saja ada partai yang mengalami konflik internal sebelum memastikan mendukung pasangan Heru-Kento, seperti yang terjadi dalam internal PAN. Pada saat rapat penentuan koalisi, terdapat dua calon yang diusung oleh PAN, yaitu pasangan Singgih yang merupakan adik kandung sekjen DPP PAN saat itu dan pasangan Heru-Kento sendiri. Namun, pada akhirnya PAN merapatkan diri kebarisan PDI Perjuangan untuk mendukung pasangan Heru-Kento.

Dinamika Dalam Internal Koalisi

Seperti kita ketahui bahwa dalam menjalin koalisi, partai politik pasti mempertimbangkan keuntungan yang akan di dapat ketika bergabung dengan partai lain. Begitupun di Purbalingga dimana ada sesuatu yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan selaku motor penggerak koalisi kepada mitra koalisinya, yaitu kemenangan. Hal ini relevan dengan potensi kemenangan PDI Perjuangan di Kabupaten Purbalingga. Dengan kemenangan tersebut, diharapkan partai-partai koalisi juga dapat lebih mengembangkan partainya di Purbalingga.

Menurut pihak PAN, selain janji kemenangan, hal lain yang menyebabkan partai ini mau bergabung dengan PDI Perjuangan adalah karena kedekatan calon yang diusung, yaitu Kento, dengan PAN dan Muhammadiyah. Senada dengan PAN, pihak PKB juga menjelaskan bahwa ada kedekatan PKB dengan sosok yang diusung, yaitu Heru Sujatmoko. Sedangkan PKS, melihat lebih jauh bahwa dengan bergabung bersama PDI Perjuangan dan memperoleh kemenangan, maka PKS akan lebih mudah menjangkau akar rumput di Kabupaten Purbalingga.

Meskipun semua pihak sama-sama berharap akan kemenangan, tetapi dalam prosesnya, di saat kampanye, pembagian tugas diantara partai-partai koalisi tidak jelas. Hanya PDI Perjuangan yang secara kasat mata berjuang semaksimal mungkin lebih dari apa yang dilakukan mitra koalisi. Bahkan, ketidakseimbangan dalam pembagian tugas ini juga ditunjukkan dari pandangan mitra koalisi PDI Perjuangan yang hanya menilai koalisi sebatas pada dukungan administratif kepada pasangan calon yang diberikan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu.

Pascaterpilihnya pasangan Heru-Kento, koalisi masih dipandang berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam koalisi. Kemudian pendapat ini diperkuat oleh partai-partai di luar koalisi yang menyebutkan bahwa koalisi berjalan baik, utamanya pada saat penyusunan perda di legislative di Kabupaten Purbalingga.

KESIMPULAN

Di Kabupaten Purbalingga PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu legislative tahun 2009 dengan perolehan suara 28,9% atau setara dengan 13 Kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi dalam pilkada tahun 2010, PDI Perjuangan menjalin koalisi dengan tiga partai, yaitu PKB, PAN, dan PKS ,dengan tujuan sebagai berikut:

1. Merangkul semua komponen masyarakat untuk mendukung pasanganHeru-Kento. Koalisi ini dijalin karena PDI Perjuangan melihat kenyataan bahwa pemilih di Kabupaten Purbalingga mayoritas beragama Islam. Dengan berkoalisi bersamapartai Islam, diharapkan pemilih beragama Islam dapat memilih pasanganHeru-Kento, pasangan yang didukung gabungan keempat partai tersebut.
2. Pertimbangan kemenangan. PDI Perjuangan menjalin koalisi dengan tiga partai tersebut dengan tujuan agar kemenangan pasangan yang mereka usung, Heru-Kento, semakin mutlak.

Begitupun dengan ketiga partai mitra koalisi PDI Perjuangan, yaitu PKB, PAN, dan PKS. Meskipun ketiganya memenuhi syarat mengusung calon sendiri ketika ketiganya berkoalisi, akan tetapi ketiganya tetap memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan dengan tujuan:

1. Adanya kedekatan personal antara partai koalisi PDI Perjuangan dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung

2. Pertimbangan kemenangan. Agar kemenangan pasangan yang mereka usung, Heru-Kento, semakin mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.. 404
- Firmanzah, Ph.D. 2011. *Mengelola Partai politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 376
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hlm. 77
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 356